



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan: 1. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN); 2. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	22 (dua puluh dua)
Hari/Tanggal	:	Senin, 9 Juli 2018
W a k t u	:	Pukul 15.15 s.d 17.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F.Gerindra), didampingi oleh: 1. H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG).
Sekretaris Rapat	:	Eguh Setiawan, S.IP. (Pit. Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019; 2. Penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Tahun 2019.
Hadir	:	1. 27 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala BSN beserta jajaran; 3. Kepala BP Batam beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN dan Kepala BP Batam dibuka pukul 15.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari ini adalah dalam rangka membahas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Tahun 2019.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Kepala BSN dan Kepala BP Batam untuk menjelaskan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Tahun 2019.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Kepala BSN dan Kepala BP Batam.

II. KESIMPULAN

A. BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp203.342.412.000,00 (dua ratus tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang dibagi ke dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, dan Program Pengembangan Standardisasi Nasional.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Standardisasi Nasional sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) sesuai penugasan dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional, sehingga total anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun 2019 menjadi sebesar Rp235.342.412.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari program:
 - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, sebesar Rp116.758.327.000,00
 - a. Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN
 - b. Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN
 - c. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN
 - 2) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, sebesar Rp118.584.085.000,00
 - a. Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
 - b. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
 - c. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
 - d. Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
 - e. Kerja Sama Standardisasi
 - f. Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi
 - g. Penelitian dan Pengembangan Standardisasi
 - h. Perumusan Standar
 - i. Peningkatan Penerapan Standar

Selanjutnya, hasil penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun 2019 akan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019.

B. BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran BP BATAM Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp1.832.418.909.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke dalam program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bersumber dari:

- a. BLU/PNBP sebesar Rp1.624.835.445.000,00,
 - b. Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp193.621.568.000,00, dan
 - c. Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP-PHLN) sebesar Rp13.961.896.000,00.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan perubahan dari sumber pembiayaan melalui PNBP pada tahun 2019 dari Rp1.624.835.445.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp1.273.307.499.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Anggaran nomor: S-982/AG/2018 tanggal 25 Mei 2018.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran BP BATAM dari Rupiah Murni sebesar Rp565.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima miliar rupiah) untuk membiayai pekerjaan yang mendukung prioritas nasional serta kontribusi pendanaan dari sisi pemerintah dalam pengembangan infrastruktur model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terhadap kegiatan:
- a. Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar
 - b. Pembangunan infrastruktur akses kawasan industri (KSN)
 - c. Pengembangan Bandar Udara Hang Nadim
 - d. Pengembangan Rumah Sakit BP BATAM

Sehingga total anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar Rp2.045.890.963.000,00 (dua triliun empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari program:

- a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp826.828.136.000,00, dan
- b. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Rp1.219.062.827.000,00.

Selanjutnya, hasil penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran BP Batam Tahun 2019 akan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB.